

DINAMIKA SOSIAL MASYARAKAT PASCA-PEMEKARAN DESA TUNGGULO SELATAN TAHUN 2011-2021

Nova Baruadi¹, Joni Apriyanto², Moh. Imron Rosidi³

¹Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia; baruadinova@gmail.com

²Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia; joni.apriyanto@ung.ac.id

³Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia; mohimronrosidi@ung.ac.id

Corresponden E-Mail; baruadinova@gmail.com

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
Diterima: 12 Juli 2026 Direvisi: 13 Juli 2026 Disetujui: 20 Juli 2026 Tersedia Daring: 20 Juli 2026 Kata Kunci: Dinamika Social; Pemekaran Wilayah; Sosiologi Pedesaan; Sejarah Lokal; Tunggulo Selatan	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis latar belakang pembentukan Desa Tunggulo Selatan dan dinamika sosial masyarakat pasca-pemekaran periode 2011-2021. Penelitian menggunakan metode sejarah melalui tahapan heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi, dipadukan dengan pendekatan sosiologis. Pengumpulan data bertumpu pada dokumen utama, seperti Perda No. 26 Tahun 2011 dan RPJMDes, serta wawancara yang melibatkan informan kunci dari kalangan pelopor pemekaran, aparat, dan warga desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemekaran pada 2011 didorong oleh luasnya wilayah desa induk yang menghambat jangkauan birokrasi. Pemisahan ini berdampak langsung pada perbaikan akses pelayanan publik administratif yang lebih dekat dan memicu akselerasi pembangunan infrastruktur fisik secara bertahap. Selama satu dekade, dinamika sosial terekam spesifik pada berbagai aspek. Pada bidang pendidikan, orientasi masyarakat bergeser dari pelibatan anak di lahan agraris menjadi kesadaran akan pentingnya pendidikan formal yang mulai terintegrasi dengan teknologi digital. Pada ranah sosial-budaya, penetrasi gawai memunculkan individualisme yang mengurangi intensitas komunikasi tatap muka serta memudahkan minat kaum muda pada tradisi. Namun, mekanisme resiliensi budaya tetap berjalan; tradisi gotong royong tidak ditinggalkan, melainkan dimodifikasi penerapannya menjadi instrumen partisipasi warga dalam pembangunan infrastruktur desa. Dapat disimpulkan, pemekaran mendorong transisi masyarakat menuju pola hidup yang lebih modern tanpa sepenuhnya kehilangan pijakan nilai komunal.

ABSTRACT
Keywords: Keyword Social dynamics; territorial expansion; rural sociology; local history; Tunggulo Selatan

This study aims to analyze the background of the formation of Tunggulo Selatan Village and the social dynamics of its community during the post-expansion period of 2011-2021. The research employs a historical method encompassing heuristics, source criticism, interpretation, and historiography, integrated with a sociological approach. Data collection relies on primary documents, such as Regional Regulation (Perda) No. 26 of 2011 and the Village Medium-Term Development Plan (RPJMDes), alongside interviews involving key informants from expansion pioneers, village officials, and local residents. The results indicate that the 2011 expansion was driven by the vast area of the parent village, which hindered bureaucratic reach. This separation directly impacted the improvement of closer access to administrative public services and triggered a gradual acceleration of physical infrastructure development. Over a decade, social dynamics were specifically observed across various aspects. In education, the community's orientation shifted from involving children in agricultural fields to an awareness of the importance of formal education, which began to integrate with digital technology. In the socio-cultural realm, gadget penetration fostered individualism, reducing the intensity of

face-to-face communication and diminishing the youth's interest in traditions. Nevertheless, cultural resilience mechanisms persisted; the tradition of mutual cooperation (gotong royong) was not abandoned, but its application was modified into an instrument for citizen participation in village infrastructure development. In conclusion, the expansion encouraged the community's transition toward a more modern lifestyle without completely losing its foundation of communal values.

© 2023
This is an open access article under CC-BY license



1. Pendahuluan

Perubahan sosial merupakan suatu proses dinamis yang niscaya dialami oleh setiap entitas masyarakat, yang dipicu oleh akumulasi berbagai faktor internal maupun dorongan eksternal. Pergeseran pranata sosial ini dapat memanifestasikan dirinya dalam ritme yang lambat dan bertahap, maupun terjadi secara akseleratif bergantung pada intensitas intervensi dan arah pembangunan daerah. Dalam hierarki sistem pemerintahan di Indonesia, desa berkedudukan sebagai satuan teritorial dan sosial terkecil yang bersinggungan langsung dengan realitas kehidupan warganya. Oleh karena kedudukan tersebut, struktur kemasyarakatan di wilayah pedesaan tidak luput dari pusaran perubahan sosial yang merestrukturisasi pola hidup, cara pandang, dan interaksi sosial mereka. Desa Tunggulo Selatan menghadirkan representasi empiris yang jelas mengenai fenomena pergeseran sosial di tingkat lokal. Wilayah ini menyajikan potret utuh tentang dinamika kemasyarakatan yang bergeser secara tajam dalam satu dekade terakhir, secara spesifik direkam sejak desa ini resmi dimekarkan dari desa induknya, yakni Desa Tunggulo, pada tahun 2011.

Secara geografis, Desa Tunggulo Selatan berlokasi di dalam wilayah Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Secara administratif, kawasan ini diklasifikasikan sebagai satu dari 14 desa yang membangun kesatuan kewilayahan di tingkat kecamatan tersebut. Sebelum menetapkan diri sebagai satuan tata praja yang mandiri, teritori ini masih berinduk dan terikat secara yurisdiksi pada Desa Tunggulo. Selama masa integrasi dengan desa induk tersebut, muncul akumulasi persoalan administratif yang bersumber dari luasnya jangkauan kewilayahan. Kondisi dimensi spasial yang terlampaui luas menyebabkan instrumen pelayanan pemerintahan desa kesulitan untuk menjangkau lapisan masyarakat pinggiran secara merata dan proporsional. Tekanan pada sistem birokrasi ini semakin diperberat oleh tren pertumbuhan jumlah penduduk yang merangkak naik secara berkelanjutan.

Kondisi demografis yang berpadu dengan hambatan rentang kendali wilayah inilah yang pada akhirnya mengkristalkan wacana otonomi. Pemekaran Desa Tunggulo Selatan secara rasional dilatarbelakangi oleh kebutuhan mendesak dari basis warganya terhadap akses pelayanan birokrasi pemerintahan yang lebih efektif dan efisien. Di samping motif tata kelola tersebut, masyarakat setempat menghendaki adanya pemekaran guna mempercepat roda pembangunan infrastruktur fisik pedesaan. Apabila

alokasi pengelolaan tata ruang difokuskan pada skala geografis yang lebih terukur, maka pemerataan sarana dan prasarana dasar diyakini dapat dieksekusi secara optimal. Legitimasi legal atas aspirasi penduduk ini secara paripurna disahkan melalui penerbitan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pembentukan Desa Tunggulo Selatan. Disahkannya landasan hukum ini tidak semata memisahkan tapal batas administratif, tetapi sekaligus meresmikan babak baru pergeseran struktur sosial dan kapasitas kelembagaan masyarakatnya yang diamati dalam kurun 2011 hingga 2021.

Dalam tradisi sosiologi pedesaan, penelusuran rekam jejak dinamika penduduk pasca-kebijakan administratif bukanlah lahan yang benar-benar tanpa rujukan. Sebagai instrumen untuk memosisikan nilai kebaruan dari kajian ini, penulis mengidentifikasi beberapa publikasi terdahulu. Pada tahun 2022, Wardhani Firdha Aprillia telah merampungkan studi berjudul "Dinamika Perubahan Sosial Masyarakat Di Masa". Riset ini memusatkan kerangka pandangnya pada pergeseran interaksi yang spesifik terjadi saat krisis pandemi. Objek lokasi dari telaah tersebut diletakkan pada lingkungan penduduk Desa Kaliwedi, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas.

Selain literatur tersebut, Wa Liana beserta sejumlah kolaboratornya pada tahun 2025 menerbitkan riset komprehensif bertajuk "Dinamika Kehidupan Sosial Masyarakat Pedesaan" yang dimuat dalam Journal On Education. Metode telaah sosiologis yang diadopsi dalam kajian mereka bertumpu pada penggunaan teori struktur-fungsional, teori konflik, serta pendekatan interaksi simbolik. Lewat pembedahan akademis itu, Wa Liana dkk mengemukakan temuan empiris bahwa masyarakat desa pada hakikatnya masih merekatkan ikatan sosial lewat gotong royong dan tingkat ketergantungan yang esensial pada sektor agraris. Namun demikian, intrusi gelombang modernisasi disinyalir mulai menggerus nilai-nilai tradisional, yang berimplikasi pada eskalasi konflik antargenerasi.

Rujukan relevan lainnya dihadirkan oleh tim penulis yang terdiri atas Ngimadudin, Badul Majid, Ari Anggara, Cindy Hanasari, Milda, Ming Putri Sari, dan Tiara Mitra Sari pada tahun 2024 melalui Jurnal Uluhan: Pengabdian Kepada Masyarakat. Artikel yang diberi tajuk "Dinamika Sosial Masyarakat Di Desa Tugu Sempurna II Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas" ini mengalokasikan fokusnya pada lanskap relasi interpersonal. Kajian ini memaparkan pola keberlangsungan hidup dan strategi sosial budaya komunitas lokal ketika berhadapan dengan pergeseran realitas wilayahnya.

Merujuk pada telaah kritis terhadap deretan referensi tersebut, kajian ini dapat merumuskan celah penelitian secara definitif. Penelitian yang dilakukan oleh Wardhani Firdha Aprillia memiliki spesifikasi sempit pada adaptasi krisis kesehatan. Sementara itu, diskursus dari kelompok Wa Liana maupun Ngimadudin dkk memfokuskan variabel pengamatannya pada letupan konflik budaya antargenerasi secara konseptual di wilayah pedesaan luar Sulawesi. Posisi penelitian ini dengan tegas mengambil jarak karena menjadikan momentum pemekaran wilayah dari desa induk sebagai determinan tunggal lahirnya dinamika sosial tersebut. Wilayah Desa Tunggulo Selatan dikaji karena memiliki karakter adaptasi komunal yang khas. Selanjutnya, penelitian ini mengunci ruang

lingkup temporal pada pengamatan longitudinal sepuluh tahun pasca-pembentukan wilayah (2011-2021) untuk merekam tahapan pergeseran sosial secara utuh.

Bertolak dari penjelasan latar belakang permasalahan dan kedudukan celah riset yang telah ditetapkan, kajian ini mengerucut pada rumusan dua pertanyaan pokok. Pertama, studi ini berupaya membedah bagaimana latar belakang empiris terbentuknya Desa Tunggulo Selatan. Kedua, studi ini merumuskan pertanyaan mengenai bagaimana wujud konkrit dinamika sosial yang berjalan melintasi dimensi waktu tahun 2011 hingga 2021. Selaras dengan problematika tersebut, tujuan operasional penulisan artikel ini adalah menganalisis konstelasi faktor pendorong terbentuknya Desa Tunggulo Selatan secara definitif. Di samping itu, kajian ini didesain dengan tujuan sentral untuk menganalisis arus dinamika sosial masyarakat pada periode 2011-2021 secara komprehensif, guna menghasilkan bacaan utuh atas resiliensi masyarakat dalam fase transisi administrasi perdesaan.

2. Kajian Teori

Pendekatan utama yang digunakan dalam penulisan artikel ini bersandar secara penuh pada perspektif sosiologis, dengan menitikberatkan pada dua instrumen konseptual, yakni sosiologi pedesaan dan perubahan sosial. Pada konsep yang pertama, pijakan teoretis dirumuskan dengan merujuk pada pandangan Bertrand yang mendefinisikan sosiologi pedesaan sebagai sebuah cabang sosiologi khusus. Cabang ilmu ini secara intensif mempelajari pola hidup serta dinamika kehidupan masyarakat yang berdiam di wilayah pedesaan. Konsep ini memposisikan desa bukan sekadar sebagai batas-batas wilayah administratif dan geografis semata, melainkan sebagai sebuah ekosistem sosial yang hidup, kompleks, dan saling terikat satu sama lain. Penggunaan pendekatan sosiologi pedesaan dalam studi ini secara spesifik diarahkan untuk membongkar dan memahami karakteristik masyarakat desa dari berbagai dimensi fundamental yang membentuknya. Dimensi-dimensi tersebut mencakup anatomi interaksi sosial yang terbangun secara natural antarwarga, konstruksi struktur masyarakat yang menopang tatanan lokal, hingga pola pembentukan kelompok-kelompok sosial di tingkat akar rumput. Lebih dari itu, konsep sosiologi pedesaan ini secara tajam turut mengamati elemen-elemen pembentuk masyarakat seperti kebudayaan lokal, peran dan fungsi lembaga-lembaga kemasyarakatan, sistem kekuasaan, pembagian kewenangan otoritas, serta berbagai bentuk perubahan terstruktur yang terjadi di dalam tatanan desa tersebut. Pemahaman menyeluruh terhadap dimensi ini menjadi pijakan dasar untuk memetakan anatomi kemasyarakatan sebelum dan sesudah intervensi administrasi dilakukan.

Melengkapi tinjauan atas ruang lingkup kemasyarakatan desa tersebut, artikel ini menggunakan konsep perubahan sosial sebagai kerangka analitis yang kedua. Konsep perubahan sosial secara fundamental mengacu pada terjadinya pergeseran di dalam struktur masyarakat, transformasi pola interaksi sosial, serta reorientasi norma dan nilai komunal yang berlangsung sepanjang perjalanan waktu. Perubahan ini pada dasarnya merupakan manifestasi dari pergeseran yang terjadi secara spesifik pada lembaga-lembaga sosial utama di dalam suatu entitas masyarakat. Transformasi kelembagaan ini secara langsung maupun tidak langsung akan memengaruhi seluruh bangunan sistem

sosialnya. Dampak turunan dari pergeseran sistem sosial ini mencakup penyesuaian nilai-nilai kultural, pergeseran norma-norma kemasyarakatan, hingga perubahan substansial pada pola perilaku, baik yang termanifestasi pada level kebiasaan individu maupun pada tataran tindakan kelompok.

Penggunaan rumusan perubahan sosial ini memiliki tingkat relevansi yang sangat tinggi untuk membaca dan mendiagnosis realitas kasus yang terjadi di Desa Tunggulo Selatan. Konsep ini difungsikan secara operasional untuk mengidentifikasi secara presisi faktor-faktor apa saja yang menjadi pemicu utama atau penyebab mendasar terjadinya perubahan di wilayah pedesaan tersebut. Selain melacak akar kausalitasnya, kacamata perubahan sosial digunakan secara ekstensif untuk membedah bagaimana dampak dari pergeseran tata nilai dan struktur birokrasi tersebut dirasakan langsung oleh masyarakat. Melalui lensa ini, fenomena desa tidak hanya dilihat sebagai entitas yang kaku, melainkan sebagai arena sosial yang secara konstan beradaptasi terhadap realitas baru.

Untuk memperkuat bangunan konstruksi teoretis tersebut, kajian ini mengintegrasikan kontribusi konseptual dari tiga penelitian empiris terdahulu yang linear. Penelitian pertama yang dilakukan oleh Wardhani Firdha Aprillia (2022) mengenai dinamika perubahan sosial masyarakat pada masa pandemi di Desa Kaliwedi, memberikan landasan teoretis krusial mengenai mekanisme adaptasi pedesaan. Kajian Aprillia menyumbangkan pemahaman mendasar bahwa struktur sosial desa memiliki tingkat kelenturan atau resiliensi tertentu ketika dihadapkan pada situasi krisis eksternal yang menuntut adaptasi cepat dari warganya. Temuan ini memperkuat kerangka analisis artikel ini dengan memberikan dasar komparatif bahwa setiap perubahan berskala luas yang mengintervensi desa, termasuk pemekaran wilayah, niscaya akan direspons masyarakat dengan membentuk strategi kelangsungan struktur sosial yang baru.

Hal ini sejalan dengan temuan teoretis yang diajukan oleh Wa Liana dkk. (2025) dalam publikasi mereka pada *Journal On Education*. Kajian tersebut membedah dinamika kehidupan sosial masyarakat pedesaan dengan memanfaatkan tiga pendekatan makro dan mikro, yakni teori struktur-fungsional, teori konflik, serta interaksi simbolik. Kontribusi teoretis dari riset Wa Liana dkk. bagi kerangka tulisan ini terletak pada kemampuannya memetakan ambivalensi yang lazim mengiringi transisi desa. Kajian tersebut menegaskan bahwa di balik transformasi perdesaan, selalu terdapat dialektika antara daya tawar masyarakat untuk mempertahankan nilai-nilai tradisional yang kohesif dengan masuknya norma baru yang lebih modern. Basis struktural-fungsional ini sangat esensial diaplikasikan untuk membedah bagaimana kelembagaan sosial di pedesaan berupaya menjaga ekuilibrium sembari mengelola eksese pergeseran zaman.

Selanjutnya, instrumen pembacaan relasi kemasyarakatan dalam tulisan ini dipertajam oleh hasil riset Ngimadudin dkk. (2024) yang diterbitkan melalui *Jurnal Ulu*. Studi yang secara spesifik membedah relasi sosial di Desa Tugu Sempurna II ini menyumbangkan fondasi konseptual yang kokoh mengenai transisi jaring interaksi interpersonal dan tata kehidupan sosial budaya akibat dinamika lokal. Literatur ini difungsikan sebagai instrumen pembandingan teoretis untuk menelisik lebih jauh mengenai pola pergeseran ikatan komunal, rutinitas komunikasi antarwarga, serta redefinisi orientasi kebudayaan pada struktur masyarakat lokal. Ketiga kajian terdahulu tersebut

secara kolektif diintegrasikan guna mensintesis kerangka yang solid, sehingga mempertajam sensitivitas analisis penelitian saat mengevaluasi proses transisi di Desa Tunggulo Selatan.

Berdasarkan paparan di atas, penggabungan antara konsep sosiologi pedesaan dan perubahan sosial membangun pijakan epistemologis yang utuh guna membedah realitas historis masyarakat Desa Tunggulo Selatan. Kerangka sosiologi pedesaan difungsikan secara fundamental untuk memetakan kondisi eksisting warga sebelum pemekaran. Pada masa tersebut, tata kehidupan masyarakat masih didominasi oleh orientasi agraris konvensional dengan keterbatasan akses infrastruktur fisik, meskipun bangunan kekerabatan komunal dan tradisi gotong royong terjalin sangat kuat. Harmoni tradisional ini kemudian berhadapan dengan kendala struktural dari desa induk, yakni bentang geografis yang terlampaui luas serta tren kenaikan jumlah penduduk. Akumulasi persoalan administratif tersebut berdampak langsung pada lambannya rentang kendali pelayanan birokrasi dan ketimpangan alokasi pembangunan bagi kelompok masyarakat di wilayah pinggiran.

Beranjak dari kesenjangan pelayanan tersebut serta menyambung posisi kajian ini di antara literatur terdahulu, intervensi kebijakan pemekaran wilayah diisolasi sebagai determinan utama pemicu perubahan. Kombinasi resiprokal dari kerangka konseptual ini digunakan secara konsisten sebagai instrumen analitis untuk menjawab rumusan masalah yang lebih terarah, yakni: (1) bagaimana konstelasi persoalan administratif dan demografis melatarbelakangi terbentuknya otonomi Desa Tunggulo Selatan pada tahun 2011; serta (2) bagaimana wujud dinamika sosial masyarakat yang melintasi dimensi transisi ekonomi, mobilitas pendidikan, dan pergeseran budaya sepanjang periode 2011-2021.

Penguraian objektif atas fenomena tersebut pada akhirnya menegaskan kontribusi spesifik dari penelitian ini. Pada ranah sejarah lokal, riset ini mengisi ruang rekam historiografi mengenai transisi kelembagaan pedesaan di wilayah Kabupaten Bone Bolango beserta riwayat adaptasi warganya melintasi satu dekade. Pada diskursus sosiologi pedesaan, kajian ini menyumbangkan pembuktian empiris mengenai watak elastisitas modal sosial di pedesaan di mana nilai luhur lokal tidak serta-merta tergerus oleh penetrasi modernisasi birokrasi dan digitalisasi, melainkan mampu direproduksi untuk menopang tata kelola peradaban komunitas yang baru

3. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang dikombinasikan dengan pendekatan sosiologis, secara spesifik mengoperasionalkan konsep sosiologi pedesaan dan perubahan sosial. Pendekatan ini difungsikan untuk menganalisis pergeseran struktur masyarakat, relasi warga, serta adaptasi kelembagaan akibat intervensi kebijakan administratif. Lokasi penelitian dipusatkan di Desa Tunggulo Selatan, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Ruang lingkup temporal dibatasi secara ketat pada rentang 2011 hingga 2021. Tahun 2011 ditetapkan sebagai batasan awal yang bertepatan dengan peresmian pemekaran desa, sedangkan 2021 menandai fase akhir pengamatan atas resiliensi masyarakat.

Tahapan pengumpulan data (heuristik) bersumber dari dokumen tertulis dan keterangan lisan. Dokumen tertulis yang digunakan mencakup arsip administratif utama, yakni Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pembentukan Desa Tunggulo Selatan, serta dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) periode 2012–2018 dan 2018–2024. Sumber lisan digali melalui wawancara langsung. Berdasarkan penelusuran data, terdapat 9 informan yang diwawancarai, di antaranya Bapak Usman Antu (82 tahun) selaku mantan Kepala Desa Persiapan dan pelopor pemekaran, aparat desa seperti Ibu Wirna Saida (39 tahun) dan Ibu Ayu (28 tahun), serta kelompok representasi warga seperti Ibu Arjuna Adam (58 tahun). Pemilihan para informan ini ditarik berdasarkan keterlibatan langsung dan pengetahuan faktual mereka terkait proses pemekaran serta fluktuasi sosial ekonomi desa.

Data yang terkumpul selanjutnya memasuki tahap kritik sumber. Kritik eksternal diterapkan untuk memverifikasi keaslian dan legalitas sumber tertulis, yaitu memastikan dokumen Perda dan naskah RPJMDes merupakan produk hukum dan kebijakan resmi yang diterbitkan otoritas berwenang. Kritik internal dilakukan guna memeriksa, menyaring, dan menguji rasionalitas informasi dari narasumber. Validasi data sejarah (triangulasi metode) dieksekusi dengan menguji silang kesaksian lisan tokoh pelopor desa terhadap data statistik demografi dan catatan program pembangunan di dalam dokumen RPJMDes. Proses persilangan ini bertujuan mereduksi bias memori informan dan memastikan objektivitas fakta sejarah.

Tahapan berikutnya adalah interpretasi, di mana fakta-fakta sejarah yang telah terverifikasi secara metodologis dianalisis menggunakan perspektif sosiologis. Data empiris mengenai urgensi pemekaran, restrukturisasi ekonomi, dan modifikasi budaya ditafsirkan guna mengurai dinamika masyarakat secara komprehensif. Historiografi bertindak sebagai tahap penulisan akhir, di mana serangkaian temuan data tersebut disintesis kembali ke dalam satu narasi akademik yang logis, kronologis, dan tematis guna memaparkan gerak transformasi komunal masyarakat Desa Tunggulo Selatan.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Latar Belakang dan Pemekaran Desa Tunggulo Selatan

Desa Tunggulo Selatan secara resmi terbentuk sebagai entitas administratif mandiri pada tahun 2011, yang sebelumnya merupakan bagian tak terpisahkan dari teritori Desa Tunggulo. Secara geografis, desa ini terletak di dalam yurisdiksi Kecamatan Tilongkabila, berjarak sekitar 1 kilometer dari pusat ibu kota kecamatan, 6 kilometer dari pusat pemerintahan Kabupaten Bone Bolango, dan membentang sejauh 15 kilometer dari ibu kota Provinsi Gorontalo. Wilayah dengan luas total 543,32 hektare ini diorganisasikan ke dalam tiga dusun. Batas wilayah administrasi menempatkan desa ini bersinggungan langsung dengan Desa Tunggulo sebagai desa induk di sebelah utara dan timur, Desa Bongo Hulawa di sebelah selatan, serta Desa Bongoime pada sisi barat.

Kajian historis mencatat bahwa sebelum pemekaran direalisasikan, kondisi sosial dan ekonomi masyarakat masih berputar pada siklus yang sederhana. Mayoritas penduduk berprofesi sebagai petani maupun pekebun, dengan tingkat kesejahteraan

yang terbatas akibat ketergantungan absolut pada fluktuasi hasil kebun. Keterbatasan ekonomi rumah tangga ini linear dengan kondisi infrastruktur fisik wilayah yang belum tertata secara optimal; jalan-jalan desa belum tersentuh aspal, sedangkan fasilitas penunjang seperti akses listrik dan instalasi air bersih telah tersedia namun distribusinya belum merata ke seluruh rumah warga. Interaksi antarwarga sesungguhnya terjalin secara harmonis, termasuk kedekatan hubungan dengan masyarakat desa tetangga. Gesekan sosial yang berujung konflik temporer memang pernah terjadi, umumnya dipicu oleh efek konsumsi minuman keras tradisional (saguer) lantaran Desa Tunggulo induk secara historis merupakan sentra produksi minuman tersebut. Kendati demikian, persoalan ini bersifat insidental dan tidak merusak bangunan kekerabatan.

Proses terbentuknya desa baru ini didorong oleh akumulasi faktor demografis dan geografis yang berujung pada kelumpuhan sistem birokrasi. Dimensi spasial wilayah administrasi yang terlampaui luas menyebabkan instrumen pengawasan dan alokasi infrastruktur gagal terdistribusi merata. Pertumbuhan jumlah penduduk terus menuntut perluasan struktur birokrasi agar distribusi bantuan sosial dan administrasi kependudukan dapat direalisasikan dengan tepat sasaran. Hasrat otonomi ini mulai dikonsolidasikan sejak tahun 2007 melalui aspirasi masyarakat yang diteruskan ke Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tunggulo. Melalui musyawarah yang melibatkan aparat desa dan tokoh masyarakat, kesepakatan pemekaran dicapai. Aspirasi ini disahkan secara definitif melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 26 Tahun 2011.

4.2 Dinamika Sosial Masyarakat 2011-2021

Pasca-pemekaran, Desa Tunggulo Selatan mengalami transisi sosiologis yang mencakup perombakan tata kelembagaan, pergeseran habitus warga, serta rekonstruksi struktur ekonomi. Pemecahan batas-batas ruang administratif ini serta-merta bertindak sebagai katalis perubahan sistem komunal yang diamati dari tahun 2011 hingga 2021.

4.3 Dinamika Sosial dalam Bidang Ekonomi

Pergeseran basis mata pencaharian warga terefleksikan melalui gradasi lintas fase. Pada rentang waktu 2011 hingga 2014, denyut ekonomi desa bertumpu kuat pada sektor agraris. Data demografi menunjukkan dominasi sektor ini, di mana 70% angkatan kerja berprofesi sebagai petani dan pekebun. Pemanfaatan sumber daya alam berpusat pada tanaman musiman, khususnya jagung, yang lambat laun bergeser ke penanaman rumput gajah sebagai komoditas bulanan penyokong kebutuhan ternak warga. Keterbatasan infrastruktur distribusi di masa awal ini menghambat penetrasi komoditas lokal ke pasar yang lebih luas.

Memasuki ekuilibrium baru pada periode 2015-2017, masyarakat mengeksekusi diversifikasi mata pencaharian. Restrukturisasi tata ruang otonom memangkas jarak rantai distribusi, menstimulasi pertumbuhan usaha mikro dan sektor informal. Berdasarkan profil demografi pekerjaan, struktur ekonomi mulai diisi oleh profesi buruh (56 orang), pedagang (48 orang), tukang (25 orang), pekerja swasta (26 orang), hingga

aparatur sipil negara (14 orang). Puncaknya pada rentang 2018-2021, eskalasi kebutuhan rumah tangga mendesak warga beranjak dari ketergantungan panen tunggal. Konsolidasi petani juga mulai melembaga melalui pembentukan 3 Kelompok Tani dan 3 Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) guna memperkuat posisi tawar hasil bumi mereka di tengah transisi ekonomi modern.

4.4 Dinamika Sosial dalam Bidang Pendidikan

Selaras Selaras dengan diversifikasi ekonomi, institusi pendidikan merekonstruksi fungsionalitasnya. Pada kurun 2011 hingga 2014, partisipasi pendidikan tergolong marjinal. Banyak anak usia sekolah direkrut orang tua demi menggarap lahan pertanian, memutus keberlanjutan akademik mereka pada tingkat dasar. Kondisi ini diperberat oleh sangat terbatasnya infrastruktur fisik pendidikan; fasilitas penunjang di dalam desa hanya ditopang oleh 1 gedung TK/PAUD dan 1 gedung SD/MI.

Ketiadaan fasilitas SLTP dan SLTA di wilayah Tunggulo Selatan menuntut siswa untuk bermobilitas ke luar desa. Gelombang perubahan kesadaran kultural muncul pada fase 2015-2017. Pola pikir generasi orang tua mengalami rasionalisasi, mendudukkan pendidikan sebagai variabel krusial untuk meretas peluang sektor formal. Pada periode 2018-2021, integrasi peranti telekomunikasi dan jaringan internet ke dalam pedagogi desa meminimalkan hambatan jarak ruang kelas fisik. Pembelajaran berbasis media digital memberi siswa keleluasaan dalam mengakses referensi belajar. Kendati kurva kesadaran meningkat tajam, daya beli finansial masih mewariskan kendala pemerataan kualitas sumber daya manusia antarkelompok masyarakat.

4.5 Dinamika Sosial dalam Bidang Budaya

Modifikasi pada lapis rasionalitas warga berimbas langsung pada fondasi budaya dan pembentukan ruang sosial. Pada masa-masa awal pasca-pemekaran, kegiatan bernapas religius dan praktik tolong-menolong dikontrol kuat oleh figur generasi tua. Saat arus gawai dan penetrasi informasi digital memasuki desa pada rentang 2015-2017, kaum muda mulai berafiliasi dengan referensi modern. Habitat layar digital yang imersif menumbuhkan individualisme baru, mengurangi intensitas silaturahmi luring yang dulunya menjadi fondasi kekuatan perdesaan.

Namun demikian, masyarakat merespons disrupsi ini melalui mekanisme resiliensi budaya (cultural resilience). Ruang partisipasi kultural dan sosial justru mulai terlembagakan melalui entitas keorganisasian desa. Wadah-wadah sosial diaktifkan untuk mewadahi aktivitas warga, dibuktikan dengan eksistensi 1 kelompok Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), 1 kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), 1 kelompok Karang Taruna sebagai motor aktivitas pemuda, 1 unit Posyandu untuk kesehatan balita, serta 1 kelompok majelis pengajian. Keberadaan organisasi ini bertindak sebagai "jangkar sosial" untuk mencegah kelumpuhan interaksi dan merawat kohesivitas warga.

4.6 Dampak Dinamika Sosial terhadap Kehidupan Masyarakat

Secara konseptual, akumulasi fenomena di Desa Tunggulo Selatan menyuguhkan representasi empiris dari teori perubahan sosial dalam kerangka sosiologi pedesaan.

Apabila dibedah berdasarkan anatomi perubahannya, faktor penyebab utama transformasi ini bersumber dari intervensi kebijakan administratif (pemekaran wilayah) guna merespons tekanan demografis dan geografis, yang kemudian berakselerasi dengan faktor eksternal berupa penetrasi teknologi digital. Bentuk perubahan yang terjadi bersifat struktural sekaligus kultural; desa bertransformasi dari entitas agraris deterministik yang terbatas menjadi komunitas sub-urban yang terintegrasi dengan rasionalitas niaga, jasa, dan pendidikan formal. Dari aspek kecepatan, dinamika ini tidak berlangsung secara revolusioner, melainkan bersifat evolutif atau bertahap (gradual) melintasi rentang satu dekade (2011–2021). Meskipun perbaikan akses administrasi dirasakan secara instan pasca-pemekaran, pergeseran habitus ekonomi dan reorientasi budaya lokal memerlukan waktu bertahun-tahun untuk mengendap menjadi tatanan sosial yang baru.

Konsekuensi dari perubahan sosial tersebut melahirkan spektrum dampak yang berdimensi ganda. Pada aspek positif, perluasan struktur tata praja memutus rantai birokrasi yang panjang. Otonomi ini mengoptimalkan kapasitas aparat desa—terdiri atas 1 Kepala Desa, 1 Sekretaris Desa, dan 9 Perangkat Desa—dalam mengeksekusi percepatan infrastruktur, seperti pengerasan jalan desa sepanjang 800 hektare dan pemerataan instalasi 643 unit sumur galian bagi warga. Namun demikian, intrusi modernisasi ini juga menelurkan residu anomie dan problematika pasca-pemekaran. Pertama, pergeseran orientasi ekonomi pasar yang kompetitif memicu kesenjangan (disparitas) kesejahteraan; sebagian warga mampu mengakumulasi modal dari sektor UMKM, sementara sebagian lainnya tertinggal akibat minimnya keterampilan praktis dan kemiskinan modal. Kedua, terjadi pergeseran pola solidaritas sosial. Fokus awal pemerintahan desa baru yang lebih bertumpu pada proyek infrastruktur fisik, berpadu dengan imersi warga terhadap ruang virtual melalui gawai, secara tidak langsung menyuburkan individualisme. Intensitas komunikasi tatap muka menyusut, sehingga hubungan antarwarga cenderung kurang kohesif dibandingkan era sebelum pemekaran.

Kendati dihadapkan pada disrupsi solidaritas dan kesenjangan tersebut, tinjauan sosiologi pedesaan membuktikan bahwa institusi kemasyarakatan lokal memiliki mekanisme resiliensi yang tinggi. Pemekaran desa dengan segala keterbatasan fiskal di tahap awalnya justru tidak menciptakan ketergantungan (dependensi) absolut masyarakat terhadap bantuan pemerintah. Sebaliknya, nilai-nilai persatuan lokal sanggup didialogkan dengan rasionalitas pembangunan birokrasi modern. Aparatur desa dan tokoh masyarakat memodifikasi tradisi gotong royong, yang dahulu eksklusif untuk aktivitas tanam-panen agraris, menjadi instrumen partisipatif pembangunan fisik. Kemandirian ini terekam kuat melalui mobilisasi swadaya warga yang menyumbangkan tenaga untuk membuat pondasi jalan, menyediakan konsumsi bagi para pekerja, hingga menginisiasi pengumpulan dana pribadi guna menutupi defisit anggaran material pembangunan sarana desa. Hal ini mengonfirmasi bahwa modal sosial di Desa Tunggulo Selatan bersifat sangat elastis, bertindak sebagai bantalan pelindung (*shock absorber*) untuk menyelamatkan peradaban masyarakat transisi dari guncangan perubahan.

5. Kesimpulan

Terbentuknya Desa Tunggulo Selatan pada tahun 2011 dilatarbelakangi oleh kebutuhan rasional masyarakat akan pelayanan birokrasi pemerintahan yang lebih efektif dan efisien. Pemekaran administratif ini dipicu oleh akumulasi tiga determinan utama: terlampau luasnya bentang spasial desa induk yang menghambat pemerataan infrastruktur, tren pertumbuhan demografis yang membebani kapasitas pelayanan kelembagaan lama, serta tingginya aspirasi kolektif masyarakat untuk mengelola tata otonomi ruangnya secara mandiri. Keputusan administratif ini bertindak sebagai solusi strategis dalam memotong rentang kendali birokrasi dan mendekatkan akses pembangunan publik secara langsung ke masyarakat perbatasan.

Menjawab rumusan masalah kedua, dinamika sosial masyarakat sepanjang periode 2011 hingga 2021 merepresentasikan tahapan transisi struktural dan kultural yang kompleks. Pergeseran ini menunjukkan transformasi bertahap dari tatanan agraris konvensional menuju tata kehidupan yang lebih adaptif terhadap orientasi pasar, pemanfaatan teknologi digital, dan kelembagaan pendidikan formal. Perubahan tersebut secara multidimensional termanifestasi melalui perluasan diversifikasi profesi non-pertanian dan rekonstruksi ruang interaksi kultural warga. Kendati pemekaran menghadirkan kemudahan mobilitas ekonomi dan administratif, transisi ini secara bersamaan memunculkan eksek sosial berupa disparitas (kesenjangan) kesejahteraan ekonomi dan penyusutan kohesivitas komunikasi tatap muka akibat penetrasi gawai yang memicu gaya hidup individualistik. Namun demikian, struktur kemasyarakatan Desa Tunggulo Selatan secara konsisten membuktikan resiliensi kulturalnya. Masyarakat mengelola turbulensi perubahan tersebut dengan mereproduksi nilai-nilai tradisional; secara khusus, mekanisme gotong royong agraris tidak ditinggalkan, melainkan dimodifikasi penerapannya menjadi instrumen swadaya partisipatif guna menopang pembangunan ketahanan komunitas di era transisi.

6. Saran

Berdasarkan temuan yang telah disimpulkan, rumusan saran operasional pertama secara tegas ditujukan kepada pemerintah daerah maupun perangkat desa setempat. Institusi pemerintahan tingkat lokal diharapkan dapat mereposisi kapasitas kelembagaannya agar tidak hanya berkutat pada penyelenggaraan administrasi pelayanan baku, tetapi harus proaktif memperkuat fungsi sebagai fasilitator pemberdayaan ekonomi lokal. Optimalisasi fungsi fasilitasi ini amat vital untuk mengawal pesatnya arus diversifikasi mata pencaharian warga pasca-pemekaran, yang ditandai dengan menjamurnya UMKM rumahan dan lapak niaga mandiri. Pihak otoritas wajib menjamin ketersediaan serta keberlanjutan infrastruktur penunjang fisik agar akses distribusi komoditas masyarakat tersebut tidak mengalami hambatan. Hal ini sejalan dengan imbauan bagi lapisan masyarakat untuk terus konsisten merawat semangat kemandirian ekonomi yang telah solid terbangun. Peningkatan kapasitas niaga sangat diperlukan agar kerentanan finansial akibat ketergantungan absolut pada sektor primer (pertanian murni), yang senantiasa rawan akan fluktuasi musim dan harga tengkulak,

dapat diminimalisasi. Mengingat format kajian ini memiliki batasan spasial dan temporal yang ketat pada masa adaptasi awal pasca-pemekaran, yakni dari 2011 hingga 2021, maka peneliti selanjutnya yang mendalami tema sosiologi pedesaan dan telaah sejarah lokal sangat disarankan untuk memperluas lokus observasi. Perluasan lingkup penelitian akan sangat berharga guna merumuskan teori transisi kemasyarakatan pedesaan yang lebih komprehensif dari berbagai lanskap sosial yang berbeda.

Daftar Pustaka

- Aprillia, W. F., dkk. (2022). *Dinamika perubahan sosial masyarakat di masa pandemi*. Wawasan Ilmu.
- Ardhani, D. M., Utaminingsih, I., & Ardana, I. (2022). Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. *Jurnal Gema Keadilan*, 9(2).
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Kabupaten Bone Bolango dalam angka 2020*.
- Cahyono, A. S. (2021). Pengaruh media sosial terhadap perubahan sosial masyarakat di era digital. *Jurnal Publiciana*, 14(1).
- Daliman, A. (2015). *Metodologi penelitian sejarah*. Ombak.
- Desa Tunggulo Selatan. (2018). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tunggulo Selatan 2018-2024*.
- Endah, K. (2018). Mewujudkan kemandirian desa melalui pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. *Moderat*, 4(4).
- Eyato, F., Miko, N. I., & Saleh, Y. (2021). Pengenalan produk Banana Milk dalam program mahasiswa di Desa Tunggulo Selatan. *Jurnal Masyarakat Teknologi*, 2(1).
- Fitriani, S. (2020). Dampak pemekaran desa aksesibilitas dan mutu pelayanan administrasi publik masyarakat terpencil. *Jurnal Tata Kelola Pemerintahan*, 12(2).
- Handayani, T., & Rahayu, S. (2022). Transformasi digital dalam pembelajaran: Tantangan dan peluang guru di wilayah hinterland/pedesaan. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, 10(2).
- Ibrahim, I. A., Novriasyah, A. M., & Yusuf, N. (2026). Analisis keterkaitan ekonomi dalam penentuan konsumsi daerah Gorontalo. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis*, 8(3).
- Kabupaten Bone Bolango. (2011). *Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pembentukan Desa Tunggulo Selatan*.
- Liana, W., dkk. (2025). Dinamika kehidupan sosial masyarakat pedesaan. *Journal On Education*.
- Maharani, G. A., & Khasanah, N. (2025). Pendidikan dan dinamika sosial masyarakat dalam perspektif sosiologi pendidikan. *Jurnal Media Akademik*, 4(1).
- Mulia, P. S., & Kurniati, E. (2023). Partisipasi orang tua dalam pendidikan anak usia dini di wilayah pedesaan Indonesia. *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 7(3).
- Ngimadudin, dkk. (2024). Dinamika sosial masyarakat di Desa Tugu Sempurna II Kec. Muara Kelingi Kab. Musi Rawas. *Jurnal Uluan*, 1(2).
- Nurisa, N. (2023). Kepercayaan masyarakat adat dan modernisasi di Kampung Naga Desa Neglasari Kecamatan Salawu Kab. Tasikmalaya. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 25(2).

- Poma, D. M., dkk. (2021). Dampak pemekaran kecamatan dalam meningkatkan pembangunan daerah. *Jurnal Ideas*, 7(4).
- Prasetyo, B. (2018). Dampak pembangunan infrastruktur konektivitas terhadap integritas sosial dan ekonomi masyarakat lokal. *Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Kota*, 14(3).
- Priyadi, S. (2012). *Metode penelitian sejarah*. Ombak.
- Rahmawati, I. (2020). Strategi penguatan kebudayaan lokal dalam kebijakan pembangunan desa pasca-otonomi. *Jurnal Kebijakan Dan Kepemimpinan Lokal*, 4(2).
- Ramdan, M., & Kadir, M. Y. A. (2021). Dinamika pemekaran desa dan dampaknya terhadap efektivitas pelayanan publik di Provinsi Gorontalo. *Jurnal Governance dan Kebijakan Publik*, 8(2).
- Rauf, A. (2020). Revitalisasi kearifan lokal dan eksistensi tradisi komunal pada masyarakat tradisional Gorontalo. *Jurnal Kebudayaan Dan Sosiologi Kultural*, 7(1).
- Rusdi, M. (2020). *Dinamika sosial masyarakat desa*. CV Pena Persada.
- Setiawan, B. (2022). Akselerasi pembangunan desa baru dan nilai komunalisme. *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 10(2).
- Sjamsuddin, H. (2007). *Metodologi sejarah*. Ombak.
- Soekanto, S. (2012). *Sosiologi suatu pengantar*. PT Raja Grafindo Persada.
- Sulasman. (2007). *Metodologi sejarah*. CV Pustaka Media.
- Suleman, S., & Napu, Y. (2021). Efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di Desa Tunggulo Selatan Kec. Tilongkabila Kab. Bone Bolango. *Jurnal Administrasi*, 3(2).
- Suryono, A., & Dwiyanto, A. (2021). Aksesibilitas dan efisiensi pelayanan publik di tingkat desa. *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 9(1).
- Suryono, B. (2023). Hibriditas budaya: Mempertahankan identitas lokal di tengah arus modernisasi ekonomi desa. *Jurnal Analisis Sosial*, 27(1).
- Sutopo, H. (2015). Dinamika ruang ekonomi baru dan perdagangan informal pasca-kebijakan publik. *Jurnal Tata Kelola dan Publik*, 2(3).
- Wahyu. (2021). *Sosiologi: Bidang khusus, perkembangan, pengertian, pendekatan, kegunaan, dan objek kajian*. Tahura Media.